

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 69 /ORG TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- ditetapkan Peraturan : a. bahwa dengan telah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, dalam rangka melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta menentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka terhadap Keputusan Bupati Bungo Nomor 45/ORG Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1956 Nomor 12 Tahun Daerah Otonom Kabupaten Pembentukan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap keseluruhan proses analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan meliputi: persiapan, pelaksanaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, serta nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua

- 1) membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- 2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
- menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati Bungo

B. Sekretaris

- membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas;
- 2) menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- 3) menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan

5	me	lapor	kan4

5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim

C. Anggota

- 1) menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan dan nilai jabatan;
- melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- 4) menyusun hasil akhir pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.
- D. Staf Sekratariat membantu kelancaran pelaksanaan tugastugas Tim Pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

KEEMPAT

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

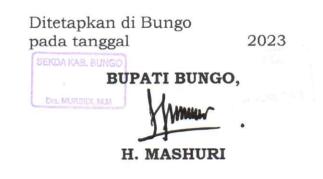
KEENAM

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 45/ORG Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023







LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR /ORG TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENGARAH ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. Pembina

: 1. Bupati Bungo

2. Wakil Bupati Bungo

II. Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

III. Sekretaris merangkap:

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

Anggota

IV. Anggota

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bungo
 - Sekda Kabupaten Bungo
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo
- 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bungo
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
- 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
- 9. Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo

TFI * H DITELITI SESUAI KENTENTUAN

K. Tanggai : Grganisasi Tanggal : Tangga

BUPATI BUNGO

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

KASUBBAO AHM KABAGANKUM
TGL KABAGANKUM
TGL KABAGANKUM
TGL KABAGANKUM
TGL KABAGANKUM
TGL KABAGANKUM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR /ORG TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. Ketua merangkap Anggota : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

II. Sekretaris merangkap Anggota : Suroto S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

III. Aggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
- 2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
- 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
- 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- 5. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
- 6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
- 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
- 8. Kepala Bagian Umum RSUD H. Hanafie Muara Bungo
- 9 Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Bungo
- 10.Achmad Amar Ma'ruf, SE (Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)
- 11.Novia Arini, S.AP (Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 12.Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analis Kepegawaian Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 13.Muhammad, A.Md (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 14.Ma'ruf, S.IP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 15.Dheny Okta Fratama, S.STP, M.Si (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)

- 16.Irwantoni, S.IP (Analis Kepegawaian Pertama pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 17. Fitriyani, S.Sos (Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)
- 18. Widya Zainur Elasari, S.STP, M.Si (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)
- 19.Lira Rahayu (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 20.Mohd. Akhmad Hambali (Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

IV. Staf Sekretariat

- : 1. Rudi Jamil, S.IP (Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)
 - 2. Fitri Fatonah, S.H. (Pembantu Administrasi Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
 - 3. Dini Anggelin, S.H. (Pembantu Administrasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)







PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. R. M. Thaher Nomor 503
Telp. (0747) 21511, Fax. (0747) 21510, Website: www.bungokab.go.id
MUARA BUNGO - 37214

Muara Bungo,

Februari 2023 M

Rajab 1444 H

Nomor

: 065/28 /Org/2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bungo

di -

MUARA BUNGO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Dari

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo

Tentang

Penetapan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bungo

Catatan

Mempedomani Tunjangan Kinerja BPK, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Perbup Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Lampiran

1 (satu) berkas.

Mohon untuk Persetujuan dan tandatangan atas

1. Surat Keputusan Bupati Bungo Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkah Bungo Tahun 2023:

Lingkungan Pemkab Bungo Tahun 2023;

 Surat Keputusan Bupati Bungo tentang Pembentukan Tim Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

3. Surat Keputusan Bupati Bungo tentang Penetapan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

LEPALA BAGIAN ORGANISASI,

HAMBALI, S.H

NIP. 19970416 2002121 005

1001 By- twas from Ath Bopa Bup Guesa of 13/23 why 1/223